

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amarudin, & Asikin, Z. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Asshidiq, J., & Safa'at, A. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekjen dan Kepaniteraan MK RI.
- Astutik Haryati, T. (2015a). *KORUPSI Perspektif Filsafat Etika Aristoteles*. STAIN Pekalongan Press.
- Astutik Haryati, T. (2015b). *KORUPSI Perspektif Filsafat Etika Aristoteles*. STAIN Press.
- Atmasasmita, R. (2020). *Moral Pancasila, Hukum, dan Kekuasaan*. Refika Aditama.
- Atmosudirdjo, P. (1994). *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia.
- Attamimi, A. H. (1990). *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Pasca Sarjana UI.
- Bagas Ramadhan, A. (2022, January 6). *Kronologi OTT Wali Kota Bekasi*. <https://News.Detik.Com/Berita/d-5887082/Kronologi-Ott-Wali-Kota-Bekasi/2>.
- Bahasa, P. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia* (Vol. 148). Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Basuki Minarno, N. (2010). *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Laksbang Mediatama.
- Brouwer, & Schilder. (1998). *A Survey of Dutch Administrative Law*. Ars Aequilibrari.
- Budihardjo, M. (1998). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Charris Zubair, A. (1980). *Kuliah Etika*. Rajawali Pers.
- Damodihardjo, D., & Shidarta. (2006). *Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Duadji. (2012). Good Governance dalam Pemerintah Daerah. *Jurnal Mimbar*, 28(2).
- Duran, W. (1959). *The story of Philosophy*. Simon and Schuster.

- Efendie Lotulung, P. (1994). *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Citra Aditya Bakti.
- Erwin, M. (2012). *Filsafat hukum*. Raja Grafindo.
- Fachruddin, I. (2004). *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Alumni.
- Fawaid, B. (2012). Hukum dan Moral Posotivist-Transcendentalist. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, 6(2), 1.
- Fitriati Firdaus, M. (2015). Analisa Kritis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 20(3).
- fnr/fra. (2022, May 22). *8 Tersangka Ikut Rekonstruksi Kasus Kerangkeng Bupati Langkat*. CNN.
- Frede Valerian, H. (2021). DISKURSUS HUKUM KODRATDAN PROBLEM PASCAMODERNITAS. *Philosophia et Theologica*, 21(1).
- Hamzah, A. (2007). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Raja Grafindo Persada.
- Handayani, Johanes, & Riki. (2018). Peranan Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan. *Jurnal Muara Ilmu Sosial*, 2(2).
- Handoyo, H. (2002). *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi Manusia*. Atmajaya.
- Hanitijo S., R. (1990). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Hartanti, E. (2005). *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.
- Hastuti Puspitasari, S. (2001). Kontektualisasi Pemikiran Machiavelli tentang Kekuasaan-Tujuan Negara. *Jurnal Hukum*, 8(18).
- Hetifa, S. (2003). *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Yayasan Obor Indonesia.
- Hiariej. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Erlangga.
- hyg/isn. (2022, September 14). *Rahmat Effendi Dituntut 9,5 Tahun Bui Kasus Gratifikasi Summarecon*. CNN.
- Ihsan, B. (2006). *Pengertian Korupsi dan Prinsip-Prinsip Antikorupsi*. Pendidikan Antikorupsi.
- Jubaedah. (2007). Pengembangan Good Corporate Governance dalam Rangka Reformasi Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 4(1).

- Julista, M. (2011). Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Sasi*, 17(2).
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma.
- Kantaprawira, R. (1998). *Hukum dan Kekuasaan*. Universitas Islam Indonesia.
- Luthan, S. (2012). Dialektika Hukum dan Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 19(4), 506–523.
- M. Hadjon, P. (n.d.). *Tentang Wewenang*.
- M. Hadjon, P. (1994). Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif). *Jurnal Yuridika*, IX(6).
- Magiz Suseno, F. (1987). *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Kanisius.
- Magnis Suseno, F. (1980). *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Kanisius.
- Magnis Suseno, F. (2001). *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Gramedia Pustaka Utama.
- Manan, B. (n.d.). *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*.
- Mardzuki. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media.
- Mulosudarmo, S. (1990). *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*. Universitas Airlangga.
- Mustansyir, R. (2008). LANDASAN FILOSOFIS MAZHAB HUKUM PROGRESIF: TINJAUAN FILSAFAT ILMU. *Jurnal Filsafat*, 18(1).
- Nadila Humaira, N. (n.d.). *IMPLIKASI PANCASILA SEBAGAI LANDASAN YURIDIS KENEGARAAN TERHADAP KETATANEGARAAN INDONESIA*. Universitas Gadjah Mada.
- Nasir Djamil, M., & Massa Djafar, T. (2016). Etika Publik Pejabat Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih. *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, 12(1). <http://www.fajar.co.id/read-20121208100729->
- Nugraha, S. (2016). Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Socioscientia*, 8(1).
- Nuh, M. (2011). *Etika Profesi Hukum*. Pustaka Setia.

- Nuraeni, S. (2020). PENERAPAN ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK SEBAGAI UPAYA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi*, 14(1).
- Nurdjana. (2009). *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*. Total Media.
- Rahardjo, S. (2004, October 2). Kejaksaan Segeralah Bertindak. *Kompas*.
- Rahardjo, S. (2005). Hukum Progresif Hukum Yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif*, 1(1).
- Raharjo, S. (2005). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rapar. (1991). *Filsafat Politik Plato*. Rajawali Press.
- Rawls, J. (2003). *Justice as Fairness*. Harvard University Press.
- Rewansyah, A. (2010). *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance*. Yusaintanas Prima.
- Ridwan, K., & Sodik Sudrajat, A. (2009). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayan Publik*. Nuansa.
- Rimbawani Sushanty, V., & Huroiroh, E. (2022). Telaah Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan. *Jurnal Legisla*, 14(2).
- Rosadi, O. (2010). HUKUM KODRAT, PANCASILA DAN ASAS HUKUM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3). <http://www>.
- Rosyada, D. (2000). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*. ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Sahara, W. (2021, August 23). *Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 Yang Menjerat Juliari Hingga Divonis 12 Tahun Penjara*. Kompas.Com.
- Santoso, L., Meyriswati, D., & Alfian, I. N. (2014). Korupsi dan mentalitas: Kendala kultural dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 27(4).
- Sanusi, A. (2009). Relasi Antara Korupsi dan Kekuasaan. *Jurnal Konstitusi*, 6(1).
- Shidarta. (2013). Konsep Malum In Se dan Malum Prohibitum Dalam Filosofi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal MMH*, 42(1).
- Soekanto, S. (1985). *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*. Rajawali Press.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1985). *Penelitian Hukum Normatif*. CV. Rajawali.

- Sudarminta. (2002). *Epistimologi Dasar Pengantar Filsafat Pengetahuan*. Kanisius.
- Suyatno. (2005). *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*. Pustaka Sinar Harapan.
- Syafrudin, A. (2000). Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab. *Jurnal Pro Justitia, IV*.
- Tafsir, A. (1997). *Filsafat umum : Akal dan Hati Sejak Thales Sampai James*. Remaja Rosdakarya.
- Thalib Rasyid, A. (2006). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Tjahjadi, L. (1991). *Hukum moral : Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris*. Kanisius.
- Tutik, T. T. (2013). Ilmu Hukum: Hakekat Keilmuannya Ditinjau Dari Sudut Filsafat Ilmu Dan Teori Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 43(2)*.
- Ubaedillah. (2015). *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*. Kencana.
- Wewo, J. A. (2019). Hukum Kodrat Dan Hukum Positif Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 2020 Yang Berintegritas. *Jurnal Jatiswara, 34(3)*. <https://beritagar.id/artikel/berita/masalah-dan-potensi-masalah-menjelang-pemilu-2019>

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan